

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.V. Dicey, 2021. *The Spirit of Legality: A. V. Dicey and the Rule of Law*. Cambridge University Press.
- Ni Keutut Sari Andyani., 2023, *Hukum Pemerintah Daerah*, Depok : Rajawali Pers
- Evita Isretno, Israhadi, 2020. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah*, Jakarta, rosdakCintya Press.
- Hendra Sudrajat, Hendra Sudrajat, Mohamad Hidayat Muhtar, Muchtadin Al Attas, Fauziyah, 2025, *Metode Penelitian Hukum (Konsepsi Dan Implementasi)*, Kota Barat, Sumatra Barat, GET PRESS INDONESIA.
- Imam Mahdi, Iskandar Zulkarnain Oktaria, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: IPB Press
- Is, M. S., M. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Kencana, Jakarta,
- Jusuf Irianto, 2025. *Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sektor Publik*. Airlangga University Press.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Nursadi, H. (Ed.). 2019. *Hukum Administrasi Negara Sektor*. Badan Penerbit FHUI.A.W.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suprpto, S. 2024. *Administrasi Kepegawaian*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Titik Triwulan T, S. H. 2016. *Hukum tata usaha negara & hukum acara peradilan tata usaha negara Indonesia*. Prenada Media.
- Tundjung Herning Sitabuana, 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konpress

JURNAL

- Arhdan, S. M., & Khairani, K. 2023. Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Law Review*
- Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R. A., & Azzahri, R. Oktober 2025. Perbandingan Mekanisme *Checks and Balance* Dalam Sistem Pemerintah Indonesia Dan Malaysia. *Integrative Perspectives of Social And Science Journal*
- Assyayuti, Mazdan Maftukha, 2022 Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 2.
- Eva Nadya Pramesti 2023, Analisis Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* Vol 3, No. 2, 2023.
- Eviva Nur Khobiburahman dkk, 2020, Penerapan System Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 3 No 2.
- Fatkul Muin 2014. Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Pengurusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah. Vol. 8 No. 1
- Herlina, M. 2021. Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. *Universitas Ekasakti Padang Indonesia. International Journal of Law*, Vol. 5 Issue 3
- Juliani, H. 2020. Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 3 No. 1
- Kardin M. Simanjuntak 2015 Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia Vol 7 No. 2.
- Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram). *Jurnal IuS*.
- Melanie Putria Maharani Hartono, 2025, Mutasi Kerja Aparatur Sipil Negara, Vol. 7 No. 4.
- Moh. Alfatah Alti Putra, 2021, Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana, Vol 7 No. 2.

- Muhammad Syaiful Anwar, 2024, Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Pengisian Jabatan, Vol 3, No 1,
- Muh. Alfian Fallahiya. 2024. Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ. *Journal Of Social Science Research*. Vol 4. no 1.
- Muliana, Chatarina. 2019. Abuse of power in the perspective of administrative law in. *International Journal of Law*. Vol 5 No 3
- Nasution, S. R. A., & Sembiring, A. S. 2022. Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*. Vol 1. No. 1
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. 2018. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*,
- Rifa'i, I. J., & Azizah, N. 2025. Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum. *Constitution Journal*, Vol 4, No. 1.
- Sunarto, 2016, Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol 45 No. 2
- Swansa, R. T., Afyah, S., & Hudi, M. 2025. Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Di Indonesia. *Law Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Irfan 2025, Legitimasi Penjabat Kepala Daerah, *Jurnal Hukum Berkeadaban* Vol 1, No 1.
- Vina Nuraini, 2025, Presepsi terhadap Rotasi dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol 4 No. 4.
- Rindengan, T. J., Sumbu, T., dan Setiabudhi, D. O. 2025. Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah Dan Penjabat Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Lex Privatum*, Vol 15 No 2.
- Pratiwi, H. A. 2021. Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Perspektif Siyasah Dusturiyah (*Doctoral dissertation*, UIN Fatmawati Sukarno).

Putri, S. E. 2024. Kewenangan kementerian dalam negeri terkait pemberian mutasi oleh penjabat kepala daerah (*Doctoral dissertation*, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

D. WEBSITE / INTERNET

<https://jakartatimur.kpu.go.id/berita/baca/7806/perbedaan-pj-pjs-plt-dan-plh>, Diakses pada 23 November 2024.

<https://www.gempurnews.com/2024/05/20/pj-bupati-bondowoso-mutasi-vi-pejabat-eselon-ii/> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2025.

<https://ketik.com/berita/14-pejabat-dimutasi-pj-bupati-bondowoso-pastikan-pelantikan-jelang-pilkada-sudah-dapat-izin> Diakses pada tanggal 4 Februari 2026.